

## PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA

Lisda Van Gobel & Laila Yusuf  
STIA Bina Taruna Gorontalo

[lisdavangobel69@gmail.com](mailto:lisdavangobel69@gmail.com)<sup>1</sup> & [bukujurnalstia@binataruna.ac.id](mailto:bukujurnalstia@binataruna.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada sejumlah informan. Teknik analisis data menggunakan tehnik analisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan.

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal disebabkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian; Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari kelengkapan berkas yang disediakan oleh masyarakat tidak efisien selama melakukan proses pengurusan akta kematian yang dapat menghambat proses penerbitan akta kematian; Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara dari segi koordinasi kurang terjalin antara pemerintah desa dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara sehingga memberikan kerugian pada masyarakat akan ketentuan persyaratan yang berlaku sebagai prosedur penerbitan akta kematian

Disarankan: Perlunya Sosialisasi secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai prosedur pengurusan akta kematian; Perlunya kelengkapan berkas yang menjadi persyaratan untuk penerbitan akta kematian; Perlu menjalin Koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah untuk mengikuti perkembangan persyaratan kelengkapan berkas dalam penerbitan akta kematian

Kata Kunci: **Pelaksanaan, Penerbitan, Akta, Kematian**

---

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman

dan peristiwa penting tersebut di antaranya adalah kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman

hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah peraturan dibidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya manusia yang mengalami musibah kematian tentu memerlukan suatu keabsahan dalam tatanan suatu wilayah yang memberikan keluarga dari orang yang ditinggalkan akibat kematian memiliki identitas dari hal kematian,. Sebuah akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris dari keluarga yang tinggalkan, atau dapat memberi arah ke pengadilan secara otentik dari dasar hukum yang berlaku di indonesia. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti: kematian, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan

Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas, Akta Kematian memiliki peranan penting dalam Akta Catatan Sipil sebagai Akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang yang dapat memberikan kepastian hukum pada peristiwa-peristiwa kematian bagi umat manusia.

Masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengalami peristiwa kematian maka keluarga dari yang meninggal ini dapat memiliki Akta Kematian sebagai kepentingan ahli waris dalam hal yang bersangkutan dapat membuktikan sebagai bukti kematian yang sah di dalam penegakkan hukum. Sanksi administratif dan denda Bagi masyarakat yang lalai atau tidak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah peristiwa kematian, akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi paling banyak satu juta rupiah. Dasar Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatakan setiap penduduk dikenai sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting.

Untuk mempermudah proses penerbitan akta kematian bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara maka dibutuhkan sebuah upaya dari dinas yang menerbitkan akta kematian yakni Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mereka akan

mengetahui manfaat dari akta kematian bagi ahli waris.

Namun demikian kenyataan yang ada tampaknya dari pelaksanaan penerbitan akta kematian ditemukan belum maksimal dapat dilihat dari: Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa belum optimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang nantinya selama melakukan pengurusan administrasi penerbitan akta kematian memenuhi prosedur pengurusan administrasi seperti kelengkapan kartu keluarga, surat kematian dari desa, KTP, atau data ahli waris, masih Kurangnya kelengkapan Berkas yang disediakan oleh masyarakat dalam hal menyiapkan persyaratan yang harus di lengkapi sesuai prosedur disaat melakukan pengurusan akta kematian di dinas catatan sipil, Masih Kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk kebutuhan sinkronisasi data mulai dari penulisan nama dalam kartu keluarga yang sering tidak sesuai dengan data yang tercatat di dinas catatan sipil untuk memberikan capaian verifikasi data akurat dalam pelaksanaan penerbitan akta kematian.

### **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara?

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada semua pihak, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi sebagai ilmu pengetahuan dalam mewujudkan suatu program tepat sasaran yang mengarah pada pengembangan disiplin ilmu administrasi negara / publik.

Secara praktis penelitian dapat dijadikan bahan kajian lanjutan maupun referensi yang berhubungan dengan perwujudan dari Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tehnik analisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap satu variabel atau lebih, dimana

prosedur penelitian deskriptif menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan pendekatan metode kualitatif adalah jenis penelitian berdasarkan pendekatan penelitian dilakukan pada kondusif obyek yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen utamanya / instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara gabungan dan menghasilkan data deskriptif (Wiratha, 2008:54)

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. yang dilakukan melalui 3 (tiga) aspek yaitu:

#### **Aspek Sosialisasi**

Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi penerbitan akta kematian yang sesuai prosedur pengurusan administrasi seperti kelengkapan kartu keluarga, surat kematian dari desa, KTP, atau data ahli waris.

#### **Aspek Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelengkapan Berkas yang disediakan oleh masyarakat dalam hal menyiapkan persyaratan mulai dari kartu keluarga, ahli waris sampai dengan surat kematian sesuai prosedur disaat melakukan pengurusan akta kematian di dinas catatan sipil.

### **Aspek Koordinasi**

Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah daerah untuk kebutuhan sinkronisasi data yang dapat memberikan verifikasi data akurat sehingga memudahkan pelaksanaan penerbitan akta kematian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis dan wawancara dengan beberapa informan serta berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara ditinjau dari aspek sosialisasi, kelengkapan berkas dan koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Aspek sosialisasi merupakan tahapan dalam memberikan pemahaman masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kematian yang bertujuan untuk mencapai fungsi tertib administrasi melalui tata cara dan mekanisme pengurusan akta kematian secara efektif.

Hasil penelitian ditinjau dari aspek sosialisasi menunjukkan bahwa bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham akan prosedur pengurusan akta kematian yang sesuai dengan persyaratan untuk penerbitan dokumen akta kematian sehingga masih seringkali berkas yang dimasukkan tidak sesuai prosedur sebagai acuan penyelesaian dokumen akta kematian pada saat itu juga, masih ada masyarakat yang

belum paham atau belum memiliki kesadaran dalam melakukan pengurusan akta kematian dimana sebagian besar warga yang tidak melaporkan peristiwa kematian adalah warga masyarakat yang dari segi ekonominya tergolong miskin dan tidak mengetahui manfaat akta kematian serta sebagian enggan untuk mengurusnya, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari pada akta kematian yang nantinya sebagai bukti sah mengenai status kematian seseorang, terdapat tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang sehingga menyebabkan minat masyarakat melakukan pengurusan akta kematian sampai di tingkat desa yang tidak memiliki kemauan untuk melakukan pengurusan di tingkat kabupaten yang dapat menerbitkan akta kematian.

Aspek kelengkapan berkas merupakan indikator yang penting dalam melakukan pengurusan penerbitan akta kematian yang di jadikan sebagai panduan pelaksanaan akta kematian di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara sebagai kebutuhan administrasi yang harus di penuhi oleh masyarakat selama melakukan proses penerbitan akta kematian.

Hasil penelitian ditinjau dari aspek kelengkapan berkas menunjukkan bahwa kelengkapan berkas selama melakukan pengurusan administrasi penerbitan akta kematian sesuai prosedur belum maksimal diakibatkan oleh masih banyak masyarakat yang belum paham akan prosedur pengurusan akta kematian yang sesuai dengan

persyaratan untuk penerbitan dokumen akta kematian sehingga masih seringkali berkas yang dimasukkan tidak sesuai prosedur sebagai acuan penyelesaian dokumen akta kematian pada saat itu juga, masih ada masyarakat yang belum paham atau belum memberikan sesuai prosedur yang mengakibatkan keterlambatan penerbitan akta kematian salah satu contoh masyarakat sebagai pemohon tidak menyiapkan dokumen ahli waris atau kartu tanda penduduk yang terdaftar dalam kartu keluarga, prasyarat kelengkapan berkas dalam penerbitan akta kematian memudahkan masyarakat selama proses penerbitan kata kematian menunjukkan hasil yang berbeda di tingkat desa dengan prasyarat di tingkat kabupaten sehingga berkas tersebut yang disediakan oleh masyarakat belum dapat diproses tepat waktu, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat melakukan pengurusan akta kematian tidak melalui tahapan di tingkat desa yang harus menyiapkan surat pengantar kematian dari pemerintah desa diakibatkan oleh kemauan masyarakat melakukan pengurusan secara cepat tanpa melalui prosedur untuk memenuhi pengurusan dana santunan duka yang diberikan batas waktu yang justru memberikan keterlambatan proses penerbitan akta kematian.

Aspek koordinasi adalah sebuah kegiatan yang saling berkesinambungan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk pelaksanaan penerbitan akta

kematian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara sehingga mewujudkan kebutuhan sinkronisasi data yang dapat memberikan verifikasi data akurat yang memudahkan pelaksanaan penerbitan akta kematian.

Hasil penelitian ditinjau dari aspek koordinasi menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dengan pemerintah daerah masih sangat kurang diakibatkan kurang kepedulian pemerintah desa dalam melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang mengakibatkan tumpang tindih aturan yang telah di tetapkan yang mengakibatkan kerugian waktu dalam melakukan pengurusan akta kematian oleh masyarakat.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai manfaat kepemilikan akta kematian sehingga tidak mewujudkan tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian.
2. Masih Kurangnya kelengkapan berkas yang disediakan oleh masyarakat selama melakukan proses pengurusan akta kematian sehingga dapat menghambat proses penerbitan akta kematian.
3. Masih kurang terjalin koordinasi pemerintah desa dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Gorontalo Utara sehingga memberikan kerugian pada masyarakat akan ketentuan persyaratan yang berlaku sebagai prosedur penerbitan akta kematian.

4. Masih kurangnya Sosialisasi, kelengkapan berkas, koordinasi dalam memenuhi prosedur yang menyebabkan penerbitan akta kematian belum optimal

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan:

1. Perlunya Sosialisasi secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai prosedur pengurusan akta kematian.
2. Perlunya kelengkapan berkas yang menjadi persyaratan untuk penerbitan akta kematian.
3. Perlu menjalin Koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah untuk mengikuti perkembangan persyaratan kelengkapan berkas dalam penerbitan akta kematian.
4. Perlunya Sosialisasi, kelengkapan berkas, koordinasi dalam memenuhi prosedur untuk memberikan optimalisasi penerbitan akta kematian

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin 2008. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.

- Abidin, Z.S. 2010. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Anderson, James E. 2008. Public Policy Making: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Susilo Supardo. 2009. Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan Pengembangannya. Yogyakarta: CV. Andi offset.
- Bernardin & Russel. 2007. Pinter Manajer, Aneka Pandangan Kontemporer. Alih Bahasa Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara..
- Boediono 2009 Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPF E.
- Dunn, William N. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- 2008.- Analisis Kebijakan Publik. Edisi 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fayol, Henry. 2009. General Principles of Management, Classics of Organization Theory, Brooks/Cole. California: Publishing Company Pacific Grove.
- Friedrich, Carl J, Man and His Government. 2009. New York: McGraw-Hill.
- Gaspersz, Vincent. 2010. Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard dengan Malcolm Baldrige dan Lean Six Sigma Supply Chain Management. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Husein, Umar. 2008. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- I Made Wirartha. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Mochtar R, 2012. Sinopsis Obstetric Fisiologi dan Patologi jilid 1. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC
- Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung: CV ALFABETA
- Sinambela, LijanPoltak. 2007. Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Soesilo Zauhar. 2007. Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi, dan Strategi. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta,
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Wibawa, I.D.N. 2006. "Penanganan Dispepsia Pada Lanjut Usia",

Jurnal Penyakit Dalam, 7 (3):  
214